

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelola keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah APBD merupakan peran terpenting disuatu pemerintah daerah. APBD merupakan salah satu dokumen rencana kinerja aspek financial, dimana anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah sebagai dasar untuk melakukan pengembangan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:121) Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Aktifitas. (Faud, 2016:138).

Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerja melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Berikut ini adalah data mengenai Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014-2021 (Dalam**  
**Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<b>2014</b>	<b>69.732.574.079,91</b>	<b>57.012.477.202,91</b>	<b>81,76</b>
<b>2015</b>	<b>171.481.933.876,48</b>	<b>167.342.378.716,48</b>	<b>97,59</b>
<b>2016</b>	<b>52.165.780.746,17</b>	<b>56.165.781.557,17</b>	<b>107,67</b>
<b>2017</b>	<b>80.931.549.980,00</b>	<b>80.516.454.680,87</b>	<b>99,49</b>
<b>2018</b>	<b>83.909.359.980,57</b>	<b>78.675.665.756,56</b>	<b>93,76</b>
<b>2019</b>	<b>85.123.967.363,81</b>	<b>85.123.967.363,81</b>	<b>100,00</b>
<b>2020</b>	<b>140.669.871.521,73</b>	<b>140.669.871.521,73</b>	<b>100,00</b>
<b>2021</b>	<b>92.055.136.606,00</b>	<b>35.353.487.288,00</b>	<b>62%</b>

Sumber: BPS.OKU

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa anggaran tahun 2014 memiliki realisasi yang lebih kecil dari anggaran sebesar 81,76% dan begitu juga tahun 2015 memiliki jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi sehingga terdapat selisih biaya yang cukup besar yaitu sebesar 81,76% yang terrealisasi, berbeda dengan tahun 2016 anggaran lebih kecil dari realisasi hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang belum terrealisasi pada tahun sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu sebesar 107,67%.

Tahun 2017 anggaran lebih besar dari realisasi sehingga persentasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 99,49%. Tahun 2018 realisasi anggaran menurun menjadi 93,76% hal ini menunjukkan bahwa anggaran pemerintah daerah yang sudah direncanakan hanya terlaksana 93,76%. Pada tahun 2019 dan 2020 realisasi anggaran pemerintah daerah mencapai angka 100% hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah tercapai seluruhnya. Pada tahun 2021 realisasi anggaran pemerintah mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu menjadi 62% hal ini dikarenakan banyak

kegiatan yang terhambat oleh karena belum adanya pengganti Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga seluruh kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014-2021.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014-2021?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2014-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah untuk dapat menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.